

ANALISIS PENGARUH PAD DAN DANA TRANSFER TERHADAP BELANJA MODAL SERTA DAMPAKNYA KE PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI KOTA BITUNG

Serly Rosa Pasa¹, George M.V Kawung², Ita Pingkan F Rorong³

Email: serlypasanew@gmail.com, georgekawung@unsrat.ac.id, itapingkan@unsrat.ac.id

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana pengaruh PAD dan dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan melalui belanja modal. Alat analisis yang digunakan ialah analisis jalur dengan bantuan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan secara langsung pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana transfer tidak berpengaruh terhadap belanja modal secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan secara tidak langsung atau melalui belanja modal pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana transfer secara tidak langsung atau melalui belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan secara tidak langsung atau melalui belanja modal pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan dana transfer secara tidak langsung atau melalui belanja modal berpengaruh terhadap kemiskinan. Dan belanja modal secara langsung berpengaruh terhadap kemiskinan.

Kata Kunci : PAD, Dana Transfer, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

ABSTRACT

The purpose of this study is to see how the influence of PAD and transfer funds on economic growth and poverty through capital expenditure. The analytical tool used is path analysis with the help of SPSS 26. The results of the study show that regional own-source revenue directly has a significant effect on capital expenditure. Transfer funds do not affect capital expenditure directly. The results of the study show that indirectly or through capital expenditure, regional original income has an effect on economic growth. Fund transfers indirectly or through capital expenditures have no effect on economic growth. Capital expenditure directly affects economic growth. The results of the study show that indirectly or through capital expenditure, regional original income has no effect on poverty. Meanwhile, transfer funds indirectly or through capital expenditure have an effect on poverty. And capital spending directly affects poverty.

Keyword : PAD, Transfer Funds, Capital Expenditures, economic growth and Poverty

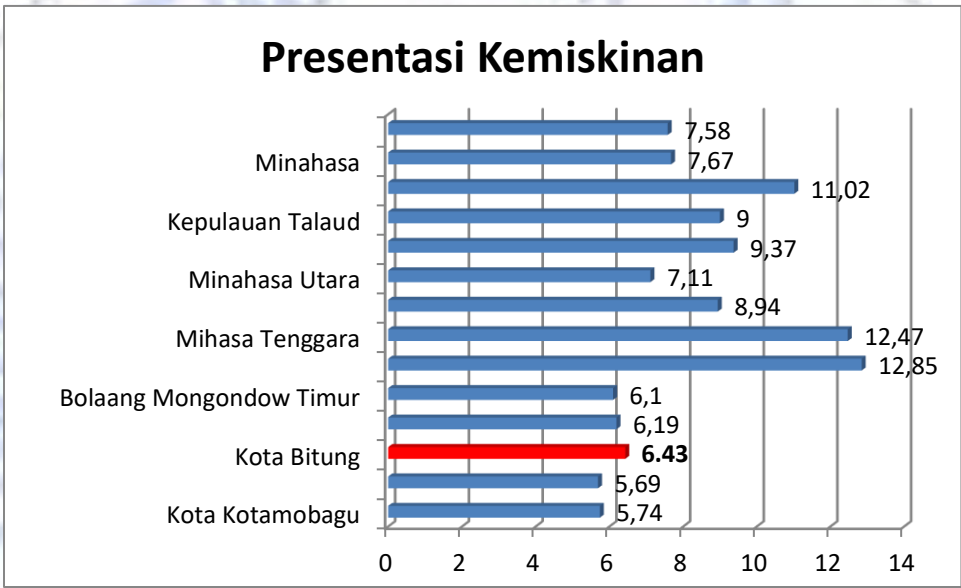
1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dikarenakan oleh standar hidup yang rendah dimana terwujud dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah atau miskin (Todaro, 2006). Pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Menurut Jonaidi (2012), terdapat hubungan dua arah yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Sebaliknya kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu dalam hal penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dimana pemerintah daerah harus menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan PAD. PAD adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah. PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Menurut Ping dan Bai (2005), pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan barang publik yang mendasar seperti perawatan medis, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Baik buruknya pengelolaan keuangan daerah akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah sehingga bisa terjadi jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat. Jumlah penduduk miskin dapat berkurang karena kegiatan dan Pertumbuhan ekonomi dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah sehingga dapat menurunkan angka jumlah penduduk miskin yang ada.

Grafik 1.
Presentasi Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2021



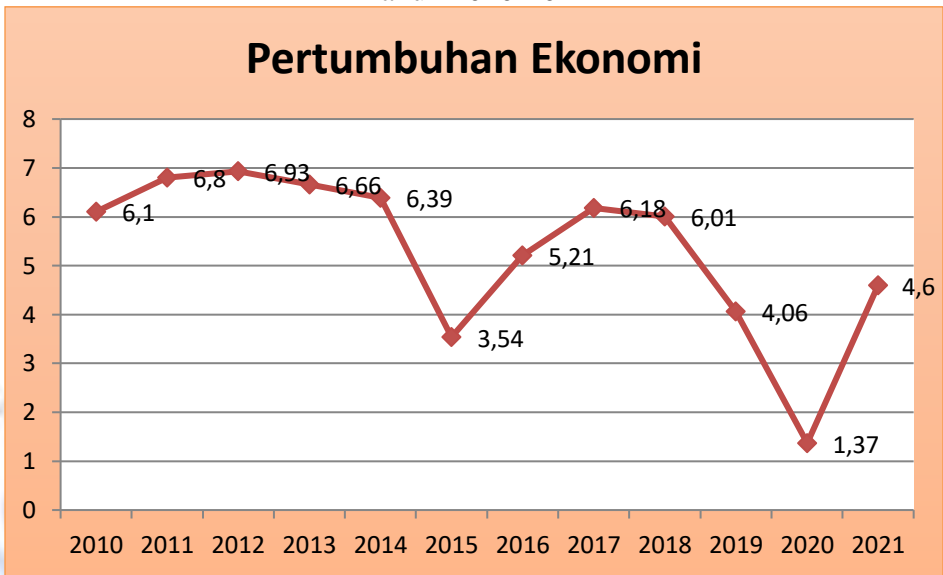
Sumber : BPS Kota Bitung 2021

Berdasarkan data diatas, presentasi kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung menduduki peringkat 10 daerah di Provinsi Sulawesi Utara dengan presentasi kemiskinan tertinggi dan menduduki peringkat pertama di empat Kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan presentasi tertinggi mencapai 6.43%. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah bagaimana untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Bitung. Walaupun kenaikan tersebut masih berada pada angka terendah dibandingkan dengan daerah lainnya yang sudah mencapai dua digit angka presentasi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan (Suparlan, 1995). Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menghambat dari pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau kebutuhan hidup yang minimum yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan (Harry Ramadhana,2008).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2010), dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Berikut ini perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Bitung:

Grafik 2.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung
Tahun 2010-2021



Sumber Data : BPS Kota Bitung

Berdasarkan grafik 1.2 dapat dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2010 sampai 2021 fluktuasi atau terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi pada tahun 2013 sebesar 6.93 % dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 3,54% kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 6,18% kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sampai 1.37%.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Sebuah wilayah dianggap berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana:2005). Pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan proses pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tidak terlepas dari keberhasilan mengelola pendapatan pengeluaran daerah baik yang bersumber dari daerah itu sendiri maupun dari dana transfer pemerintah pusat melalui APBN secara efektif dan efisien. Berikut adalah perkembangan dana transfer di Kota Bitung tahun 2010-2021 :

Tabel 1.
Dana Transfer Kota Bitung Tahun 2010-2021

Tahun	Dana Transfer
2010	327.481.918.000
2011	352.630.749.839
2012	440.111.231.759
2013	492.770.558.386
2014	550.441.543.914
2015	503.702.709.603
2016	678.650.861.794
2017	676.975.326.351
2018	771.801.631.408
2019	726.026.664.451
2020	622.348.090.825
2021	800.025.357.594

Sumber : BPS Kota Bitung 2021

Berdasarkan table 1 perkembangan dana tranfer di Kota Bitung Tahun 2010 dana transfer Kota Bitung sebesar 327.481.918.000 juta rupiah mengalami kenaikan pada tahun 2011 sebesar 352.630.749.839 juta rupiah. Tahun 2012 naik menjadi 440.111.231.759 juta rupiah, tahun 2013 meningkat menjadi 492.770.558.386 juta rupiah dan terus naik sampai tahun 2016 menjadi 678.650.861.794 juta rupiah. Pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 676.975.326.351 juta rupiah dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 771.801.631.408 juta rupiah. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 726.026.664.451 juta rupiah terus turun sampai tahun 2020 menjadi 622.348.090.825 juta rupiah dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 800.025.357.594 juta rupiah. Dana transfer yang diterima pemerintah daerah merupakan pembagian yang harus diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang yang disebut otonomi daerah. Untuk itu pemerintah daerah dengan program-program yang ada diharapkan mampu mengali potensi-potensi daerah yang bisa memberikan pendapatan untuk daerah, pemerintah daerah juga menerima bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana perimbangan. Penggunaan dana perimbangan yang saat ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah, membuat pemerintah daerah memegang peran penting. Kemana dana perimbangan akan dialokasikan dan didistribusikan sangat mempengaruhi manfaat dari dana perimbangan tersebut. Transfer pemerintah pusat ini merupakan salah satu sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang nantinya akan dilaporkan dalam perhitungan APBD. Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kota Bitung masih sangat diharapkan oleh pemerintah daerah karena masih kurangnya PAD yang ada di Kota Bitung.

Tabel 2.
Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Kota Bitung
Tahun 2010-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal
2010	18.875.511.960	113.239.795.525
2011	25.394.063.796	103.257.610.472
2012	38.435.120.911	129.165.574.193
2013	44.000.000.000	131.163.554.173
2014	71.654.094.447	147.857.043.508
2015	106.133.530.054	171.232.907.302
2016	82.886.448.410	222.967.119.701
2017	103.479.596.018	197.088.797.032
2018	109.652.849.471	302.862.622.352
2019	88.193.758.190	222.678.090.274
2020	64.735.031.362	71.674.810.283
2021	71.484.630.988	143.075.879.820

Sumber : BPS Kota Bitung 2021

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung tahun 2018 sampai 2021 dapat dilihat bahwa PAD Kota Bitung tiga tahun terakhir 2018 sampai 2020 mengalami penurunan PAD. Tahun 2018 sebesar 109.652.849.471 juta rupiah turun pada tahun 2020 mencapai 64.735.031.362 juta rupiah dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 71.484.630.988 juta rupiah. Penurunan PAD ini dapat dilihat dari peningkatan kemiskinan yang ada dimana pemerintah daerah belum mampu mengelola potensi daerah dengan maksimal tercermin dari data yang ada, juga dilihat dari belanja modal dimana perkembangannya juga mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai 2020. Tahun 2018 belanja modal sebesar 302.862.622.352 juta rupiah mengalami penurunan tahun 2020 menjadi 71.674.810.283 juta rupiah dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 143.075.879.820 juta rupiah.

Peranan dana transfer sangat besar dalam aktifitas keuangan yang ada di daerah Kota Bitung. Transfer dana desentralisasi ini dilakukan dengan mekanisme Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Transfer atau Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah, serta mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan mempersembahkan otonomi kepala

daerah, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Melihat hal ini, pajak-pajak masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi besaran dana yang dialokasikan untuk Pemerintah dan Daerah, termasuk kabupaten atau kota dalam daerah yang bersangkutan. Dana transfer atau Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung yang menjadi objek penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dana transfer Pemerintah Pusat terhadap belanja modal di Kota Bitung, peranan belanja modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peranan PAD terhadap dana transfer. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait judul “ **Analisis Pengaruh PAD dan Dana Transfer terhadap Belanja Modal serta dampaknya ke Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan**”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Tranfer terhadap Belanja Modal.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Tranfer dan Belanja modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Tranfer dan Belanja modal terhadap Kemiskinan.

Tinjauan Pustaka Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara- negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara (Daerah) untuk menyediakan semakin banyak barangbarang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan

teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jhingan, 2007) Bahwa Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai Kenaikan GDP/GNP tanpa memandang, apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan dalam jangka panjang naik.

Menurut Sukirno (2002) Pertumbuhan Ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (Todaro, 2000):

- a. Akumulasi modal Termasuk investasi baru yang berwujud tanah, peralatan dan sumber daya manusia. Hal ini akan terjadi apabila bagian dari pendapatan sekarang akan ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang.
- b. Pertumbuhan Ekonomi Berhubungan dengan kenaikan angka kelahiran kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja maka semakin banyak faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan pasar domestiknya.
- c. Kemajuan Teknologi Kemajuan yang disebabkan oleh cara-cara baru dan lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional seperti: cara menanam padi, membuat pakaian dan sebagainya. Dengan klasifikasi kemajuan teknologi tersebut yaitu hemat tenaga kerja dan hemat modal.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrick, 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru (Carunia, 2017).

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah maka akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan

sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi maka akan mendapatkan alokasi umum yang rendah (Prastiwi, 2008).

Dana alokasi umum selanjutnya digunakan pemerintah untuk mendanai pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat. Salah satu pelayanan tersebut adalah pelayanan pendidikan, dimana pendidikan sangatlah penting kedudukannya bagi masyarakat. Dengan terselenggaranya pelayanan pemerintah pada bidang pendidikan secara merata dan baik, maka suatu daerah dikatakan baik tingkat kemajuan daerahnya karena masyarakat telah mendapatkan hak yang mereka miliki yakni pelayanan terhadap dunia pendidikan. Dengan majunya pendidikan suatu daerah, maka masyarakatnya dapat membantu untuk meningkatkan mutu dari daerahnya tersebut.

Dana Alokasi Khusus

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat. Dana ini memiliki tujuan yakni membantu suatu daerah untuk melakukan pendanaan akan sarana dan prasarana terhadap masyarakat daerah serta untuk mendanai pembangunan daerah agar tercapainya sasaran prioritas nasional. Dana alokasi khusus merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan khusus pada suatu daerah yang menjadi suatu urusan tersendiri bagi daerah tersebut dan dilakukan dengan prioritas nasional. Pembiayaan tersebut diantara lain adalah untuk sarana prasarana masyarakat, dengan sarana dan prasarana yang lengkap maka akan mendorong cepatnya kemajuan pembangunan suatu daerah.

Dana alokasi khusus merupakan salah satu dari bentuk dari dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Novianto, 2015). Apabila pengelolaan dana alokasi khusus dikelola dengan baik untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah, dana alokasi khusus ini akan dapat digunakan sebagai dana yang mampu memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan serta membantu mengurangi kerusakan infrastruktur dengan cara merawat infrastruktur yang ada dengan menggunakan dana tersebut. Sehingga dana alokasi khusus dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. DAK sangat penting bagi dunia Pendidikan, pemerintah daerah membutuhkan pengelolaan DAK yang terarah sehingga akan membantu menaikkan tingkat dan mutu Pendidikan di daerah tersebut.

Dana Bagi Hasil

Menurut Putra, dkk (2015) dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang. Dana tersebut kemudian dialokasikan kepada daerah-daerah berdasarkan prinsip *by origin*, dimana daerah penghasil mendapat lebih banyak dana. Hal tersebut terjadi karena pemerintah pusat lebih mengutamakan masyarakat setempat daerah penghasil sumber daya agar dapat memberikan manfaat bagi daerah tersebut.

DBH yang telah ditransfer dari pemerintah pusat diharapkan untuk dapat meningkatkan alokasi belanja daerah itu sendiri. Sistem dana bagi hasil yang berjalan dengan baik, menandakan terlaksananya otonomi daerah secara luas dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. DBH memiliki sifat memberi keleluasaan pada suatu daerah untuk mengelola dana tersebut yang akan dipergunakan untuk mendanai belanja daerah yang produktif seperti meningkatkan mutu Pendidikan suatu daerah. Karena apabila mutu pendidikan suatu daerah baik, maka kualitas sumber daya manusia pada daerah tersebut juga baik yang otomatis akan mengangkat mutu dari daerah tersebut. Yang menjadi tujuan utama dari dana bagi hasil ini adalah untuk mengurangi terjadinya ketimpangan fiskal secara vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki potensi yang besar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan pada daerahnya.

Belanja Modal

Menurut (Mursyidi, 2009), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak,

maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Belanja Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut (Halim, 2007) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset lainnya untuk memberikan manfaat lain dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ini berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang dalam pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang menghasilkan Belanja Modal.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan antara variabel PAD dan Dana Transfer terhadap belanja modal dan dampaknya ke pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Bitung dengan pengambilan data melalui Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kota Bitung. Waktu penelitian dilakukan tahun 2010 sampai 2022.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Sedangkan intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung.

Analisis Path

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Menurut Retherford (1993) Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regres berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung (Sarwono, 2012). Sedangkan menurut Webley (1997) mengatakan analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (*magnitude*) dan signifikansi (*significance*) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel (Sarwono, 2012). Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya analisis jalur merupakan kepanjangan dari regresi berganda.

Regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung (pemberi respon) sedangkan yang lain sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan juga penghitungan uji keselarasan statistik (Garson, 2003).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Model Persamaan I

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan *Eviews 8* untuk mengetahui pengaruh antara variabel Belanja Modal (Y_1) (variabel dependen) dengan PAD (X_1) dan Dana Transfer (X_2) (variabel independen) di Kota Bitung :

Tabel 1
Hasil Regersi variabel PAD dan Dana Transfer
terhadap Belanja Modal

Dependent Variable: Y1					
Method: Least Squares					
Sample: 2010 2021					
Included observations: 12					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
X1	1.564444	0.705169	2.218539	0.0537	
X2	-0.008585	0.099735	-0.086075	0.9333	
C	6.02E+10	3.87E+10	1.555282	0.1543	
R-squared	0.551343	Mean dependent var	1.63E+11		
Adjusted R-squared	0.451642	S.D. dependent var	6.40E+10		
F-statistic	5.529939	Durbin-Watson stat	2.083754		
Prob(F-statistic)	0.027140				

Sumber data ; Hasil olah Eviews 8

Koefisien Jalur Model I

Berdasarkan output Eviews 8 diatas, diketahui pada persamaan substruktur 1 dalam model penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji besar pengaruh nilai PAD dan Dana Transfer terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (X₁) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal (Y₁) secara positif (+) sebesar 1.564444. Hasil ini sesuai dengan yang disarankan dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif (+) antara ke duanya. Hasil ini juga mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik sebesar 95% atau pada tingkat α 5%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai t_{stat} lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel} .Nilai t_{stat} sebesar 2.218539 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1.8311.

Berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai Dana Transfer (X₂) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y₁). Hal ini terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0.9333 atau lebih besar dari α 10%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai t_{stat} lebih kecil dibandingkan nilai t_{tabel} . Nilai t_{stat} sebesar 0.086075 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1.38303. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara variabel dana transfer terhadap belanja modal.

Hasil estimasi memiliki koefisien determinasi (R²) sebesar 0.5513 atau 55.13%. Nilai ini memiliki arti bahwa variabilitas belanja modal yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel PAD dan Dana Transfer adalah sebesar 55.13% sedangkan sisanya sebesar 44.87% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model ini.

Secara keseluruhan, variabel nilai pendapatan asli daerah dan dana transfer mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F_{stat} sebesar 5.529939 yang lebih besar daripada nilai F_{tabel} sebesar 4.26 pada tingkat keyakinan 95%.

Model Persamaan II

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan Eviews untuk mengetahui pengaruh antara variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y₂) (variabel dependen) dengan PAD (X₁), Dana Transfer (X₂) dan Belanja Modal (Y₁) (variabel independen) di Kota Bitung :

Tabel 2
Hasil Regersi variabel PAD, Dana Transfer dan Belanja Modal
terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dependent Variable: Y2 Method: Least Squares Sample: 2010 2021 Included observations: 12				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-4.930011	2.570011	-1.916921	0.0915
X2	-8.620013	2.930012	-0.294281	0.7760
Y1	2.320011	9.780012	2.370183	0.0452
C	5.407819	1.279661	4.225978	0.0029
R-squared	0.490864	Mean dependent var		5.320833
Adjusted R-squared	0.299938	S.D. dependent var		1.663405
F-statistic	2.570963	Durbin-Watson stat		1.539807
Prob(F-statistic)	0.127011			

Sumber data ; Hasil olah Eviews 8

$$Y_2 = 5.407819 + 2.320011 X_1 - 8.620013 X_2 - 4.930011 X_3 + e$$

Berdasarkan output Eviews diatas, diketahui pada persamaan substruktur II dalam model penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji besar pengaruh nilai PAD, Dana Transfer dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (X₁) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y₂). Hal ini terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0.0915 atau lebih kecil dari dari α 10%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai t_{stat} lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel}.Nilai t_{stat} sebesar 1.916921 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1.39602. hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai Dana Transfer (X₂) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y₂). Hal ini terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0.7760 atau lebih besar dari α 10%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai t_{stat} lebih kecil dibandingkan nilai t_{tabel}. Nilai t_{stat} sebesar 0.294281 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1.39602. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara variabel dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai belanja modal (Y₁) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y₂). Hal ini terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0.0452 atau lebih kecil dari dari α 5%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai t_{stat} lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel}.Nilai t_{stat} sebesar 2.370183 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1.85955. hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil estimasi memiliki koefisien determinasi (R²) sebesar 0.4908 atau 49.08%. Nilai ini memiliki arti bahwa variabilitas pertumbuhan ekonomi yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel PAD, Dana Transfer dan Belanja Modal adalah sebesar 49.08% sedangkan sisanya sebesar 50.92% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model ini.

Secara keseluruhan, variabel nilai pendapatan asli daerah, dana transfer dan belanja modal tidak berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F_{stat} sebesar 2.570963 yang lebih besar daripada nilai F_{tabel} sebesar 4.07 pada tingkat keyakinan 95%.

Model Persamaan III

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan Eviews untuk mengetahui pengaruh antara variabel Kemiskinan (Y₃) (variabel dependen) dengan PAD (X₁), Dana Transfer (X₂) dan Belanja Modal (Y₁) (variabel independen) di Kota Bitung :

Tabel 3
Hasil Regersi variabel PAD, Dana Transfer dan Belanja Modal
terhadap Kemiskinan

Dependent Variable: Y3				
Method: Least Squares				
Sample: 2010 2021				
Included observations: 12				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-9.490012	8.780012	-1.080874	0.3113
X2	-3.750012	9.990013	-3.751964	0.0056
Y1	5.040012	3.340012	1.509257	0.1697
C	8.920957	0.436564	20.43450	0.0000
R-squared	0.833071	Mean dependent var		7.023333
Adjusted R-squared	0.770472	S.D. dependent var		0.991063
F-statistic	13.30816	Durbin-Watson stat		1.068591
Prob(F-statistic)	0.001778			

Sumber data ; Hasil olah Eviews 8

$Y_3 = 8.920957 - 9.490012 X_1 - 3.750012X_2 + 5.040012 X_3 + e$

Berdasarkan output Eviews diatas, diketahui pada persamaan substruktur II dalam model penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji besar pengaruh nilai PAD, Dana Transfer dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai pendapatan asli daerah (X₁) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y₂). Hal ini terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0.3113 atau lebih besar dari α 10%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai t_{stat} lebih kecil dibandingkan nilai t_{tabel}. Nilai t_{stat} sebesar 1.080874 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1.39602. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara variabel dana transfer terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai dana transfer (X₂) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y₂). Hal ini terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0.0056 atau lebih kecil dari dari α 1%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai t_{stat} lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel}.Nilai t_{stat} sebesar 3.751964 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2.89646. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara dana transfer terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil estimasi didapatkan hasil bahwa nilai belanja modal (Y₁) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y₃). Hal ini terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0.1697 atau lebih kecil dari dari α 10%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai t_{stat} lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel}.Nilai t_{stat} sebesar 1.509257 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1.39602. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara belanja modal terhadap kemiskinan.

Hasil estimasi memiliki koefisien determinasi (R²) sebesar 0.8330 atau 83.30%. Nilai ini memiliki arti bahwa variabilitas kemiskinan yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel PAD, Dana Transfer dan Belanja Modal adalah sebesar 83.30% sedangkan sisanya sebesar 16.7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model ini.

Secara keseluruhan, variabel nilai pendapatan asli daerah dan dana transfer mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F_{stat} sebesar 13.30816 yang lebih besar daripada nilai F_{tabel} sebesar 4.07 pada tingkat keyakinan 95%.

1. Pengaruh Langsung (Direct Effect atau DE)

- a. Pengaruh variabel PAD terhadap Belanja Modal = (X₁ → Y₁) = 1,564.
Pengaruh langsung antara variabel PAD terhadap Belanja Modal senilai 1,564.
- b. Pengaruh variabel Dana Transfer terhadap Belanja Modal = (X₂ → Y₁) = 0,008
Pengaruh langsung antara variabel Dana Transfer terhadap Belanja Modal senilai 0,008.
- c. Pengaruh variabel PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi = (X₁ → Y₂) =4,930

- Pengaruh langsung antara variabel PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi senilai 4,930.
- Pengaruh variabel Dana Transfer terhadap Pertumbuhan Ekonomi = $(X2 \rightarrow Y2) = 8,620$
Pengaruh langsung antara variabel Dana Transfer terhadap Pertumbuhan Ekonomi senilai 8,620.
 - Pengaruh variabel PAD terhadap Kemiskinan = $(X1 \rightarrow Y3) = 9,490$
Pengaruh langsung antara variabel PAD terhadap Kemiskinan senilai 9.490.
 - Pengaruh variabel Dana Transfer terhadap Kemiskinan = $(X2 \rightarrow Y3) = 3,750$
Pengaruh langsung antara variabel Dana Transfer terhadap Kemiskinan senilai 3.750.
 - Pengaruh variabel Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi = $(Y1 \rightarrow Y2) = 2,320$
Pengaruh langsung antara variabel Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi senilai 2,320.
 - Pengaruh variabel Belanja Modal terhadap Kemiskinan = $(Y1 \rightarrow Y3) = 5,040$
Pengaruh langsung antara variabel Belanja Modal terhadap Kemiskinan senilai 5,040.

2. Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect* atau *IE*)

- Pengaruh variabel PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* $(X1 \rightarrow Y1 \rightarrow Y2) = (1,564 \times 2,320) = 3,628$.
Pengaruh tidak langsung PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* adalah senilai 3,628.
- Pengaruh variabel Dana Transfer terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* $(X2 \rightarrow Y1 \rightarrow Y2) = (0,008 \times 2,320) = 0,018$
Pengaruh tidak langsung Dana Transfer terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* adalah senilai 0.018.
- Pengaruh variabel PAD terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* $(X1 \rightarrow Y1 \rightarrow Y3) = (1,564 \times 5,040) = 7,882$.
Pengaruh tidak langsung PAD terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* adalah senilai 7.882.
- Pengaruh variabel Dana Transfer terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* $(X2 \rightarrow Y1 \rightarrow Y3) = (0,008 \times 5,040) = 0,040$
Pengaruh tidak langsung PAD terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* adalah senilai.

3. Pengaruh Total (*Total Effect* atau *TE*)

- Pengaruh variabel PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* $(X1 \rightarrow Y1 \rightarrow Y2) = (1,564 + 2,320) = 3,884$
Total pengaruh antar variabel PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* adalah senilai 3.884.
- Pengaruh variabel Dana Transfer terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* $(X1 \rightarrow Y1 \rightarrow Y2) = (0,008 + 2,320) = 2,328$
Total pengaruh antar variabel PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* adalah senilai 2.328.
- Pengaruh variabel PAD terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* $(X1 \rightarrow Y1 \rightarrow Y3) = (1,564 + 5,040) = 6,604$
Total pengaruh antar variabel PAD terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* adalah senilai 6.604.
- Pengaruh variabel Dana Transfer terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* $(X2 \rightarrow Y1 \rightarrow Y3) = (0,008 + 5,040) = 5,048$
Total pengaruh antar variabel Dana Transfer terhadap Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai variabel *intervening* adalah senilai 5.048

Pembahasan

1. Pengaruh PAD dan Dana Transfer terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dan belanja modal. Hasil ini juga membuktikan bahwa

hipotesis diterima. Artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah maka belanja modal akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya *Ceteris paribus*. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2009) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang didapatkan dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana transfer tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara dana transfer dengan belanja modal. Hasil ini juga menolak hipotesis yang ada. Artinya kenaikan dana transfer tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dana transfer atau dana perimbangan merupakan alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana transfer ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana transfer sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program-program yang ada di daerah. Dana transfer meliputi: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hairiyah, Lewi dan Zaki (2017) yang menyatakan bahwa Dana Transfer tidak berpengaruh secara signifikan.

2. Pengaruh PAD, Dana Transfer dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini juga membuktikan bahwa hipotesis diterima. Artinya bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu juga dengan potensi-potensi yang di kelola oleh pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat. Karena jika PAD meningkat, pemerintah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi yang ada dengan cara memberikan belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan daerah, sehingga jika pembangunan daerah tersebut baik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2020) yang menyatakan adanya pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana transfer tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara dana transfer dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga hasil ini menolak hipotesis penelitian. Artinya kenaikan atau penambahan dana transfer dari pemerintah pusat belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumala (2018) yang menyatakan bahwa dana transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal dapat bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan memiliki sifat produktif sehingga dapat menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Menurut Harrod-Domar faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu pembentukan modal, pembentukan modal dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan (Arsyad, 2010:84). Belanja modal adalah salah satu bentuk dari pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yaitu hubungan keduanya bisa diamati dari meningkatkan pelayanan public yang merupakan tujuan utama dari otonomi daerah.

3. Pengaruh PAD, Dana Transfer dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara

pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan. Sehingga dengan hasil yang didapat ternyata pendapatan asli daerah yang di peroleh belum mampu untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada. Artinya apabila mengalami peningkatan akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin karena PAD yang diterima sebahagian dapat digunakan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan sehingga dengan peningkatan jumlah PAD akan bisa menurunkan jumlah penduduk miskin. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh RANY (2021) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa dana transfer berpengaruh terhadap kemiskinan. Artinya ketambahan dana transfer yang dikelola oleh pemerintah daerah mampu menurunkan angka kemiskinan. Hasil ini searah dengan penelitian yang dilaksanakan Jolianis (2014) yang menghasilkan bahwa Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian dari dana transfer memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kemiskinan. Artinya apabila belanja modal meningkat maka akan menurunkan angka kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan antara belanja modal terhadap kemiskinan. Belanja modal yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukan secara langsung pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana transfer tidak berpengaruh terhadap belanja modal secara langsung.
2. Hasil penelitian menunjukan secara tidak langsung atau melalui belanja modal pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana transfer secara tidak langsung atau melalui belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Hasil penelitian menunjukan secara tidak langsung atau melalui belanja modal pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan dana transfer secara tidak langsung atau melalui belanja modal berpengaruh terhadap kemiskinan. Dan belanja modal secara langsung berpengaruh terhadap kemiskinan

Saran

1. Bagi pemerintah daerah Kota Bitung agar bias mengelolah potensi-potensi daerah yang bias menunjang pertumbuhan ekonomi melalui program-program atau kegiatan yang bisa membantu masyarakat sehingga bisa berdampak pada penurunan kemiskinan.
2. Bagi penulis selanjutnya agar bisa menamba variable penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007.** Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Arius Jonaidi.2012.** Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi. Vol. 1, No. 1, April 2012 hal.: 140- 164.
- Basri, F dan Munandar, H. (2010),** “Dasar – Dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan & Aplikasi Metode Kuantitatif”, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta
- Baldric Siregar 2017,** Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Carunia Mulya Firdausy. 2017.** Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Harahap, Sofyan Syafri. 2006.** Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad

- Jhingan, M. L. (2007).** Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Edisi 1. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mursyidi.2009.** Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Bandung: RefikaAditama
- Nugroho, Heru. 1995.** Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan. Yogyakarta : Aditya Media
- Novianto Riko, Hanafiah Rafiudin. 2015.** Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Vol.4 No.1 Januari-Juni 2015 : ISSN : 2302-7169.
- Prastiwi, Hana. 2008.** Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah daerah (Studi pada Kabupaten/Kota se Jawa). Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Putra, Putu Gede W, dkk. 2015.** “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 11 (3) : 863-877. ISSN: 2302- 8556
- Ping, Xin-Qiao and Jie Bai. 2005.** Fiscal Decentralization Local Public Good Provision in China. Economic Research, pp: 1-27.
- Retherford, Robert D. (1993).** Statistical Models For Causal Analysis. Program on Population East-West Center , Honolulu, Hawaii.
- Ramadhana, Harry, 2008.** Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan, Dan Angka Harapan Hidup Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Barat. Universitas Andalas
- Suparlan, Supardi, 1995,** Kebudayaan Kemiskinan dalam Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropolog Perkotaan, Yogyakarta: YOI.
- Suryana, Achmad. 2005.** Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Andalan Pembangunan Nasional. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Anjak_2005_IV_pdf.
- Suryawati. 2004.** Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy
- Sukirno, Sadono, 2002.** Makro Ekonomi Modern, P.T.Rajawali Grafindo Persada : Jakarta.
- Sarwono, J, 2012,** Path Analysis dengan SPSS: Teori, Aplikasi, Prosedur Analisis untuk Riset Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Alex Media Komputido, Jakarta
- Todaro P. Michael. 2000.** Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I, Jakarta Penerbit : Erlangga
- Todaro, M.P. 2006.** Economic Development. Seventh Edition, New York, Addition Wesley Longman, Inc.
- Webley, Paul. 1997.** “It Could Be OK! Predictors and Correlates of Participation in The National Lottery. In I. Quintanilla Pardo (Ed)”. The 22nd IAREP Colloquium (pp. 173-183). Valencia: Promolibro.